

ABSTRAK

Secara fungsional, ilmu politik mempelajari terkait fungsi dari lembaga politik dalam menentukan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik sebagai keputusan politik bukanlah produk mudah dibuat. Peraturan Daerah Tentang Pembuatan PERDAMinuman Beralkohol di Kota Surabaya merupakan produk politik yang dalam perumusannya melalui berbagai tahapan dan melibatkan berbagai kelompok-kelompok. Kelompok yang ada saling berinteraksi dan berkontestasi terkait dengan kepentingan dari tiap kelompoknya. Interaksi antar kelompok tersebut terjadi melalui pola kelompok penekan (Pressure Groups) selalu berusaha mempengaruhi orang-orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan, bukan untuk menempatkan orang-orang mereka sendiri dalam posisi yang memegang kekuasaan, setidaknya tidak secara resmi meletakkan orang-orang mereka. Tetapi, kelompok-kelompok penekan tertentu sebenarnya memiliki wakil-wakil mereka di pemerintahan dan di badan-badan legislatif, tetapi hubungan antara para individu-individu tersebut dengan kelompok yang mereka wakili tetap rahasia atau sangat hati-hati menurut Menurut Duverger.interaksi dilakukan adalah dengan tujuan tercapainya bentuk peraturan daerah yang ideal, seperti yang dikatakan oleh Thomas R. Dye bahwa dalam perumusan kebijakan yang melibatkan kelompok-kelompok harus didasarkan pada interaksi antar kelompok yang ada di dalam untuk menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan tersebut adalah yang terbaik. Akan tetapi realitasnya hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Sehingga senyatanya akan terdapat kelompok yang diuntungkan dan dirugikan. Dikatakan sebagai kelompok yang diuntungkan karena kepentingan kelompoknya lebih banyak diakomodir dalam peraturan daerah, begitu pun sebaliknya bagi kelompok yang dirugikan. Sehingga dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana PCNU kota Surabaya sebagai kelompok kepentingan mempengaruhi pembuatan dan perumusan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Kota Surabaya.

Kata Kunci : *Kelompok Kepentingan, Perumusan Kebijakan, Interaksi Antar Aktor, Peraturan Daerah*

ABSTRACT

Functionally, political science studies the function of political institutions in determining a public policy. Public policy as a political decision is not an easy product to make. Local Regulation Concerning the Making of Regional Regulation on Alcoholic Beverages in Surabaya City is a political product which is formulated through various stages and involves various groups. The existing groups interact and contribute to the interests of each group. The interaction between groups occurs through the pattern of pressure groups (Pressure Groups) always trying to influence the people who hold and exercise power, not to put their own people in positions of power, at least not officially putting their people. However, certain pressure groups actually have their representatives in government and in legislative bodies, but the relationships between these individuals and the groups they represent remain confidential or very careful according to Duverger. The interaction is done with the goal of achieving the ideal form of local regulation, as Thomas R. Dye said that in the formulation of policies involving groups should be based on the interaction between groups within to generate balance and balance is best. But the reality is that it is difficult to be realized. So in reality there will be a group that benefited and disadvantaged. It is said to be a beneficiary group because the interests of the group are more accommodated in local regulations, and vice versa for disadvantaged groups. So in this research explain how PCNU Surabaya city as interest group influence making and formulation of Regional Regulation About Alcoholic Beverage in SurabayaCity.

Keywords: Interest Groups, Policy Formulation, Interaction Actor, Local Regulation.